



# Memperkuat Kehidupan Nelayan

Oleh Kombes Pol. Drs. Ronny F. Sompie, SH.,MH. \*)

**S**EABAD kebangkitan nasional baru saja kita rayakan bersama. Eforia bangsa Indonesia yang digelorakan oleh semangat pemerintah merayakan momentum yang sangat bersejarah ini, tergambarkan penuh antusias melalui hampir semua media massa di tanah air tercinta ini. Padahal, rakyat sangat merindukan kebangkitan bangsa yang *'membumi'* dalam kehidupan mereka, tidak sekedar retorika dalam konseptual yang sangat antusias dipropagandakan, namun sangat lemah pengawasan dan pengendaliannya yang mengejauwanti di masyarakat. Oleh karenanya, setiap orang yang mengaku warga negara Indonesia saat ini, sangat patut untuk tidak sekedar berpikir bagaimana caranya untuk *'bangkit'*, seperti komentar artis Deddy Mizwar yang sering diiklankan di beberapa TV swasta, tetapi juga berbuat sesuai perannya masing-masing di negara ini.

Saya tertarik dengan tulisan Arif Satria, Direktur Riset dan Kajian Strategis IPB Bogor di harian Kompas tanggal 9 Juni 2008 pada kolom Analisis Ekonomi dengan judul "**Negeri Bahari yang melupakan Nelayan**". Dengan gaya tulisan yang sangat menggelitik, Arif Satria sesuai kompetensinya mengajak kita untuk menjawab pertanyaan, "*Apakah karena menjadi nelayan lalu miskin ataukah karena miskin lalu menjadi nelayan?*" Tentunya bukanlah kompetensi kita, para anggota Polri, untuk memikirkan dan berbuat dengan bagaimana caranya agar para nelayan menjadi sejahtera dan bangkit dari kemiskinan. Namun tidak ada salahnya kalau kita juga terpenggil untuk ikut

berperan aktif memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan hidup para nelayan, sebagai suatu keniscayaan.

Ada diantara kawan kita yang kompetensinya juga menyentuh kegiatan para nelayan, karena kegiatan tugasnya sehari-hari berada di tengah-tengah kehidupan para nelayan. Tapi apakah kawan-kawan kita tersebut sudah berbuat

maksimal untuk ikut terlibat langsung menyentuh kebutuhan para nelayan? Hal itulah yang harus kita analisa bersama, untuk selanjutnya kita tingkatkan kalau ternyata kontribusi tersebut sudah ada namun masih dalam jumlah yang relatif kecil. Yah, baru *'jeb-jeb kecil'* istilah kita kalau sedang guyon.

Apabila mengacu kepada data yang diberikan oleh Arif Satria, bahwa tingkat kemiskinan masyarakat pesisir di tahun 2002 sebanyak 32%. Ini didasarkan pada indikator pendapatan masyarakat 1 dollar AS per hari. Oleh karena itu, masih menurut Arif Satria, ada tiga hal yang harus diperbaiki un-





tuk mengatasi kemiskinan para nelayan, yaitu :

**Pertama**, memperbaiki aspek permodalan. Pemerintah telah memberikan bantuan modal berupa KUR (kredit usaha rakyat) melalui bank pelaksana, namun bank-bank pelaksana tersebut tidak selalu berada di-sentra-sentra para nelayan, terutama di lokasi pesisir. Akibatnya, para nelayan mengalami kesulitan dalam mengakses kredit tersebut. Apabila para nelayan memanfaatkan LKM (lembaga keuangan mikro) untuk mengakses kredit tersebut, maka bunga KUR yang tadinya hanya 14 % bisa mencapai 20 – 25 % ditangan para nelayan, karena LKM butuh 3-5 persen untuk 'overhead cost' dan keuntungan 3-5 persen. Disinilah tugas kita bisa dimaksimalkan, dengan cara melakukan pengamanan terhadap kegiatan penyaluran KUR, agar bisa diakses para nelayan secara optimal. Kita juga bisa mengawasi kemungkinan terjadinya bias pendistribusian KUR yang sampai ketangan para nelayan, agar tepat sarasannya, bukan dinikmati oleh segelintir pengusaha yang me-

manfaatkan kebijakan Pemerintah ini akibat lemahnya pengawasan yang terstruktur dan fungsional di lapangan. Sementara kita memiliki Polsek dan Unit Polair yang dapat melaksanakan tugas pengawasan tersebut sampai ke daerah pesisir, dimana para nelayan berkarya.

**Kedua**, diversifikasi teknologi dan usaha. Ini mutlak kompetensi intansi yang berkaitan dengan kegiatan para nelayan. Upaya yang dapat dilakukan oleh kita sebagai anggota Polri adalah memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diberikan kepada para nelayan untuk diversifikasi teknologi dan usaha telah tersalurkan secara tepat sasaran. Jangan hanya diatas kertas semata pemerintah mengambil kebijakan seperti itu, tetapi tidak diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Tugas kita adalah membantu pengawasannya, tentunya kita butuh informasi yang aktif dari instansi yang berkompeten. Biasanya justru instansi yang berkompeten sering menyimpan informasi tersebut untuk kepentingan tertentu yang tidak berpihak kepada para nelayan. Bagaimana upaya Polri untuk meluruskannya, tergantung kawan-kawan kita yang berkompeten tugasnya diantara para nelayan, apakah mampu melakukan upaya pencegahan atau penjeraman bagi oknum-oknum yang menyimpang? Kembali lagi, keberadaan Polsek dan Unit Polair sangat relevan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas tersebut.

**Ketiga**, adalah terpenuhinya kebutuhan energi untuk perikanan guna mengatasi krisis BBM saat ini. Sebagaimana penjelasan Arif Satria, saat ini baru tersedia 225 unit SPDN (Solar Packed Dealer untuk Nelayan) yang kapasitasnya hanya 20 persen dari kebutuhan 600 unit. Ternyata disamping terbatasnya modal koperasi nelayan dan lokasi yang terpencil, birokrasi Pertamina yang rumit menjadi pangkal persoalan yang dapat menjadi kendala kebutuhan energi untuk perikanan. Akibatnya, BBM menjadi langka, sehingga harga BBM mengalami kenaikan berlipat ganda pada saat tiba ditangan para nelayan. Hal ini membuat ketidak-berdayaan para nelayan, karena harga ikan yang diperoleh tidak bisa seimbang dengan harga BBM yang dipergunakan. (Arif Satria, Kompas 9 Juni 2008). Upaya Polri mengawasi distribusi BBM dari Pertamina yang disalurkan

kepada para nelayan, sangatlah penting artinya. Sementara masih sering terjadi penyimpangan pada saat distribusi BBM, akibat keterbatasan tenaga pengawas dari Pertamina. Oleh karena itu, Polri dapat memanfaatkan keterbatasan tersebut sebagai peluang untuk mendukung program Pemerintah. Melalui rentang kendali penugasan mulai Polda sampai ke Polsek-Polsek dan Unit-unit Polair yang bertugas di daerah pesisir, Polri dapat mengoptimalkan pengawasan dimaksud. Tentunya Pertamina bisa memanfaatkan dukungan pengawasan Polri ini dengan memberikan informasi yang secara berkala mudah diakses secara langsung tanpa birokrasi yang rumit.

Setelah kita berupaya sedemikian rupa untuk membantu dan memperkuat kehidupan para nelayan sesuai kompetensi tugas kita sebagai anggota Polri, biasanya muncul pelanggaran dan penyimpangan yang acapkali dilakukan oleh para anggota di lapangan atau juga atas kendali pimpinan kesatuannya. Hal ini bisa saja dicegah dengan mempertegas sistem penilaian terhadap keberhasilan pimpinan kesatuan Polri di wilayah termasuk anggotanya, khususnya sistem pemberian 'reward and punishment' yang dapat mempengaruhi pembinaan karir anggota Polri berdasarkan prestasinya di lapangan.

Selain itu, pemberian motivasi dapat juga diperjuangkan dalam bentuk insentif yang diperhitungkan berdasarkan jumlah / volume BBM, yang berhasil disita anggota Polri dari para pelaku penyimpangan distribusi BBM. Pimpinan Polri seyogyanya tidak sekedar memikirkan hal ini, tetapi juga memperjuangkan realisasinya bagi para anggota Polri yang bertugas tersebut. Pemikiran ini didasarkan kepada alasan bahwa tugas pengawasan yang dilakukan untuk mendukung tugas Pertamina sebenarnya merupakan tugas tambahan bagi Polri. Tugas yang sebenarnya sudah selayaknya dilakukan oleh Pertamina sendiri melalui perangkat tugas pengawasan yang sudah dianggarkan melalui pengajuan DIPAPertamina. Nah, ini tentunya merupakan tugas kita bersama untuk memperbaikinya, agar kredibilitas Polri makin baik di mata masyarakat dan pemerintah Indonesia.

\*)Penulis Ka Pustaka Dit Minwa PTIK



FOTO: EVA HARTINI





## KEJUARAAN NASIONAL BOLA VOLI PIALA PRESIDEN 2008

### KEJUARAAN VOLI PIALA PRESIDEN

# SATU EVENT BERAGAM KEBAJIKAN

**MENYAMBUT HUT ke- 63 Republik Indonesia (RI) dan Sumpah Pemuda 20 Oktober mendatang, Persatuan Bola Boli Seluruh Indonesia (PBVSI) menggelar pertandingan olahraga voli memperebutkan Piala Presiden.**

**E**VENT yang melibatkan peserta dari tingkat kelurahan hingga tingkat nasional ini sudah dimulai sejak 9 Mei dan berakhir akan pada acara puncaknya pada 28 Oktober 2008 mendatang.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengatakan, event ini sengaja digelar pada momen bersejarah dengan tujuan untuk membangkitkan kembali semangat berolahraga ma-

asyarakat, mulai dari tingkat desa yang paling bawah hingga tingkat nasional dengan melibatkan komponen masyarakat dari generasi muda dan tua.

"Namun yang terpenting dari event tersebut kita bisa menarik manfaat antara lain mengolahragakan masyarakat secara nasional melalui bola voli, menghidupkan toleransi kehidupan, mempererat tali persaudaraan antardaerah



serta menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara.

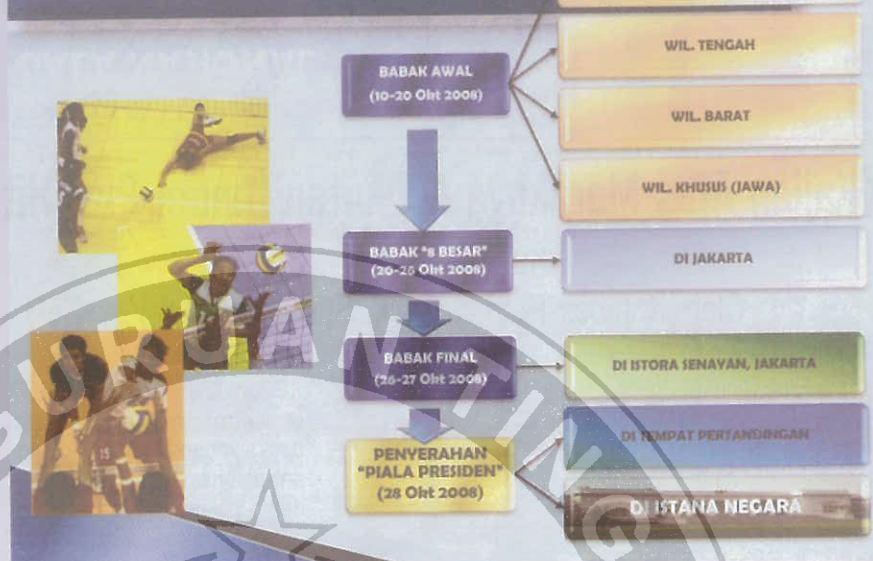
"Bagi peserta dari luar Jakarta, event ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan prestasinya dalam pertandingan tingkat nasional, sekaligus berkenalan dengan bola voli modern," jelas SBY dalam sebuah pertemuan dengan pengurus PBVI baru-baru ini.

Ditinjau dariacamata kepolisian, kegiatan ini dapat dikaitkan dengan program mitraan Polri dan masyarakat, serta mengembangkan jaringan komunikasi dengan warga masyarakat yang merupakan implementasi program Polmas.

#### LOKASI DAN JADWAL

Karena kejuaraan dilakukan mulai tingkat paling bawah, sampai desa-desa dan kelurahan, maka lokasi pertandingan pun digelar mulai dari tingkat kelurahan. Piala yang diperebutkan untuk tingkat kelurahan, 'Piala Gala Desa' (sepuluh hari 10-21 Juni 2008). Selanjutnya naik tingkat kecamatan memperebutkan 'Piala Gala Kecamatan' (tujuh hari 25 Juli-1 Agustus 2008).

## SCHEDULE PERTANDINGAN GALA NASIONAL



Tingkat kabupaten, 'Piala Gala Kabupaten' (12 hari, 6-13 Agustus). Tingkat provinsi 'Piala Gala Provinsi' (tujuh hari, 9-26 Agustus 2008) dan tingkat nasional 'Piala Gala Nasional'.

Untuk tingkat nasional zona wilayah dilakukan 10 hari, pada 10-20 Oktober 2008. Sedangkan final Gala Nasional digelar selama delapan hari, dari 20 Oktober hingga puncaknya pada 28 Oktober 2008, bertepatan pada pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda. Pada saat itulah pemenang menerima piala dari Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta.

## PEMBAGIAN ZONE WILAYAH PERTANDINGAN

4 ZONE -> 33 PROPINSI

### ZONE BARAT -> SUMSEL

(NAD, SUMUT, SUMBAR, BENGKULU, RIAU, KEP. RIAU, JAMBI, SUMSEL, LAMPUNG, BABEL)

### ZONE TENGAH -> SULSEL

SULAWESI : (SULUT, SULTENG, SULBAR, SULTRA, SULSEL, GORONTALO)  
KALIMANTAN : (KALSEL, KALBAR, KALTIM, KALTENG)

#### SYARAT

Untuk dapat mengikuti kejuaraan ini, panitia menetapkan syarat sebagai berikut : terdiri dari pemain bola voli putra-putri baik yang tergabung dalam klub maupun tidak. Usia peserta maksimal 25 tahun, warga masyarakat yang terdaftar ditingkat RT/RW sampai nasional.

Boleh jadi, dari segi jumlah peserta dan panitia, acara ini akan mendapat perhatian dari Museum Record Indonesia (Muri). Soalnya event akbar yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Indonesia ini akan menyedot sedikitnya 2.369.370 orang peserta dengan panitia berjumlah 15.468 orang. Dengan kata lain, sekali "dayung, dua-tiga pulau terlampaui". Satu event beragam kebjajikan. 0 jete- 021

### ZONE KHUSUS (JAWA) -> JATIM

(DKI JAKARTA, JABAR, BANTEN, JATENG, JATIM, DI YOGYAKARTA)

### ZONE TIMUR -> BALI

(PAPUA, PAPUA BARAT, MALUKU, MALUKU UTARA, BALI, NTB, NTT)